

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu organisasi pemerintahan tidak lepas dari aset karena dengan aset pemerintahan dapat melaksanakan operasionalnya. Salah satu elemen adalah aset tetap yaitu suatu harta berwujud dari pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya bukan untuk dijual. Aset tetap yang dimiliki oleh setiap pemerintahan mungkin akan berbeda jenisnya tergantung pada ukuran, luas operasi serta bidang atau aktivitas masing-masing organisasi pemerintahan. Umumnya aset tetap menjadi bagian utama dari aset pemerintahan karena merupakan salah satu sumber daya yang akan menciptakan pendapatan. Biasanya dana yang tertanam didalamnya adalah besar karena harga perolehan relatif mahal.

Aset tetap dalam neraca termasuk dalam klasifikasi aset yang bersifat permanen dan secara umum digunakan pemerintah untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Pada umumnya aset tetap mempunyai batas waktu, tetapi ada aset tetap yang tidak terbatas waktunya dalam memberikan manfaat bagi pemerintah, misalnya tanah.

Oleh karena itu, perolehan dari suatu aset tetap perlu dialokasikan menjadi beban sepanjang tahun dan dijadikan sebagai pengurangan pendapatan. Penentuan nilai aset tetap dan alokasi beban dari aset tetap tersebut sangat mempengaruhi rencana dalam pengambilan keputusan. Aset tetap dapat diperoleh melalui



pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah.

Dalam masa penggunaan aset tetap sering terjadi kerusakan-kerusakan sehingga pemerintah perlu mengeluarkan dana untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Hal ini berarti ada pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk perawatan agar aset tetap tersebut dalam keadaan baik. Dalam hal pengeluaran ini, perlu dibedakan apakah pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) atau pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran tersebut harus dirinci, pemerintah harus membuat batasan-batasan penilaian pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal (capital expenditure), apabila manfaat yang diperoleh dari satu periode akuntansi dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), apabila manfaat yang diperoleh hanya dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan, maka sangat dibutuhkan suatu kebijaksanaan atau penerapan akuntansi aset tetap yang tepat meliputi harga perolehan, metode penyusutan, perbaikan, penarikan, penyajian dalam laporan keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP NO. 7). Perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan cara yang sistematis dan rasional diperoleh dengan seoptimal mungkin. Agar kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan baik, aset tetap harus dalam keadaan baik juga. Hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih judul **“Penerapan Akuntansi Aset Tetap (SAP NO. 7) pada Dinas**